



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU KUSWANTO
2. Jabatan : DIREKTUR OPERASI
3. NHK : 90146

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.763.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.640.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/230 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.533.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/285 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.590.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 366.353.000

1. MOTOR, KAWASAKI 175CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
2. MOBIL, CHEVROLET TRAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
4. MOTOR, VESPA VBB VESPA VBB Tahun 1964, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. MOTOR, VESPA VESPA SPRINT Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
6. MOTOR, VESPA VESPA STRADA-BAJAJ (DOUGLAS) Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. MOTOR, VESPA VESPA SUPER Tahun 1966, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000



8. MOTOR, VESPA VESPA SPARTAN Tahun 1987, HASIL SENDIRI		
Rp. 30.000.000		
9. MOTOR, HONDA HONDA C70 Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp.		
7.000.000		
10. MOTOR, HONDA HONDA C50 Tahun 1971, HASIL SENDIRI Rp.		
14.853.000		
11. MOTOR, HONDA HONDA C90 Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp.		
8.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.898.769.516
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.043.622.516
III. HUTANG	Rp.	1.334.059.798
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.709.562.718

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.